

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya.
- Bertents, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Boediono. 2002. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro*. BPFE. Yogyakarta.
- Effendie. Bahtiar, dkk, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friederiszick, Hans W. and Frank P. Maier-Rigaud. 2007. *The Role of Economics in Cartel Detection in Europe*. European Commission. Brusel.
- Hamzah. Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap. M. Yahya, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 13, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet.2, Prenada Media Group. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. ,2012. *Teori dan Hukum Pembuktian* ,Erlangga, Jakarta.
- Ibrahim. Johnny, 2007, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, cet. II, Bayumedia, Malang.
- Kagramanto. Budi, 2007, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo.
- Khemani. R. Shyam, 1999, *A Framework for The Design and Implementation of Competition Law and Policy*, The World Bank-OECD, Washington, D.C.-Parish.
- Lubis. Andi Fahmi, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Kontek*, Creative Media, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta.

- Murniati. Rilda, 2009, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU, Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nadapdap. Binoto, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nugroho, 2012, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Mustika Belajar, Jakarta.
- OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), 2006, *Policy Roundtables Prosecuting Cartels without Direct Evidence*, OECD, Paris.
- Rokan. Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prayoga. Ayudha D. ed., 2001 *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Partnership for Business Competition, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership for Business Competition, Jakarta.
- Rahardja. Prahatma, dan Mandala Manurung, 2001, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, ed. II, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Raharjo. Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- S. A., Nugroho. 2012. *Hukum persaingan usaha di Indonesia dalam teori & praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Samudera. Teguh, 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Siswanto. Arie, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sirait. Ningrum Natasya, dkk., 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soeparmono, 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso. R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiarto, dkk. 2002. *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*. PT. Gramedia Media Utama. Jakarta.

- The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). 2010. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Yani. Ahmad, dan Widjaja Gunawan, 1999, *Anti Monopoli*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuhassarie. Emmy, dan Tri Harnowo, ed. 2004, , *Filosofi dan Latar Belakang UU No. 5 Tahun 1999 (secara ekonomis) dan Status/Kelembagaan, Wewenang & Tugas KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

### **Tesis, Penulisan Hukum, dan Jurnal**

- Anggraini. A. M. Tri, 2003, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Per Se Illegal atau Rule of Reason”, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta.
- Antoni. Veri, 2014, “The Position of Indirect Evidence as Verification Tools in the Cartel Case” *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm.137-147
- Ernawati. Asri, 2004, “Penetapan Harga dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Penetapan Tarif Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta” . *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI. Jakarta.
- Islamey. Muhammad Eldwin, 2017, “An Analysis Towards The Term “Agreemen” Under Article 5 Law Number 5 Year 1999 Concerning The Ban on Monopolistic Practice and Unfair Business Competition and Its Relation to Cartel Practices In Indonesia In Case Study: (KPPU Decision No.08/KPPU-I/2014 Concerning Tire Cartel)”, *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Strata satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Junaidi. A. 2008. “Pembuktian kartel dalam UU No. 5/1999”. *Majalah Kompetisi*, KPPU, edisi 11. Jakarta. hlm. 8-10
- Munadiya. Riris, 2011. “Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha”. *Jurnal Persaingan Usaha*. Edisi 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta. hlm. 157-196.
- Lintang Utami Nugraheni, “A Legal Analysis Towards The Usage Of Indirect Evidence On The Fulfilment Of Cartel Elements In Automatic Scooter`s Price In Indonesia Pursuant To Law No. 5 Of 1999 (case Study: Kppu Decision No. 04/kppu-i/2016)”, *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Program

Studi Strata satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- P. Ahmad Ali Fikri, 2015, “Analisis Yuridis Terhadap Eksistensi Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Penanganan Perkara Kartel di Indonesia”, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Silalahi. Udin, dan Isabella Cynthia Edgina, 2017, “Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung”, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Vol 10, Nomor 3, Jakarta, hlm. 311-330
- Sjahdeini. Sutan Remy, 2002, “Latar belakang, sejarah, dan tujuan UU Larangan Monopoli”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol 19, Jakarta. hlm.5-17
- Soemardi. Tresna P., 2009, “Kartel Internasional: Fenomena Kartel Internasional dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha dan Ekonomi Nasional”, *Jurnal KPPU*, KPPU, Edisi 2, Jakarta. hlm.41-71.
- Soleh. Mohammad, 2013, “Analisis Pembuktian Kartel dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Keputusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng)”, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wijayanta. Tata., dan Hery Firmansyah, 2011, “Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol.23, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.38-60
- Zega. Ingrid Gratsya, 2012, “Tinjauan Mengenai Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan Di Indonesia”, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. FHUI, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Ketua/Wakil Komisi, Anggota Komisi, dan Sekretariat Komisi Dalam Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 tentang Penetapan Harga

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016